

**Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun  
Anggaran 2016-2020  
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Minsel)**

***Evaluation of Regional Government Financial Performance Fiscal Year  
2016-2020  
(Case Study on the Minsel Regency Regional Financial and Asset  
Management Agency)***

**Melingchisya Merisa Tandirerung<sup>1</sup>, Dr. Jantje J. Tinangon, SE., Ak., MM<sup>2</sup>, Peter M.  
Kapojos, SE., Ak., M.Si<sup>3</sup>**

---

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado  
E-mail: [melingchisyatasya@gmail.com](mailto:melingchisyatasya@gmail.com)<sup>1</sup>; [tinangonjannyjantje@yahoo.co.id](mailto:tinangonjannyjantje@yahoo.co.id)<sup>2</sup>;  
[pmkapojos@gmail.com](mailto:pmkapojos@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**Abstrak:** Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis rasio-rasio laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ringkasan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu pemakai dalam pengambilan keputusan. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan, dimana data utama sebagai input dalam analisis ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah BPAD Minsel Tahun 2016 - 2020 dengan menggunakan analisis likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah data deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif berupa uraian-uraian seperti hasil pengamatan penulis selama penelitian berupa wawancara dan observasi, serta disajikan dalam bentuk data yang adalah tada. Hasil penelitian yang berdasarkan analisis rasio antara tahun 2016-2020 diperoleh hasil yang baik. Hal ini terlihat dari perbaikan beberapa parameter kinerja keuangan. Diantaranya peningkatan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. terlaksana dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari target yang telah dicapai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan Analisis Profitabilitas berdasarkan analisis menggunakan analisis rasio RETA dan EBITTA mengalami peningkatan dari 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kinerja Keuangan.

**Abstract:** One source of information that can be used is to analyze the ratios of financial statements. Financial statements are the final result of the accounting process at a certain time period which is the result of collecting and processing financial data presented in the form of financial statements or other summaries that can be used to assist users in making decisions. Evaluation of financial performance can be done using financial statement analysis, where the main data as input in this analysis are the balance sheet and income statement. The purpose of this study was to determine the financial performance of BPAD Minsel Regional Original Revenue from 2016 - 2020 using liquidity, solvency, and profitability analysis. And the type of research used is descriptive data with a quantitative approach, namely data presented descriptively in the form of descriptions such as the results of the author's observations during the study in the form of interviews and observations, and presented in the form of data that is tada. The results of the study that based on ratio analysis between 2016-2020 obtained good results. This is detected from the improvement of several financial performance parameters. Among them the increasing liquidity ratio and solvency ratio. done very well, this can be seen from the targets it has achieved from 2016 to 2020, which is growing every year. And Profitability Analysis based on analysis using RETA and EBITTA ratio analysis has increased from the last 2 years, from 2016 to 2020.

**Keywords:** Local Revenue (PAD), Financial Performance.

Diterima: 06-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 20-04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

## PENDAHULUAN

Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis rasio laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. Kinerja Keuangan Perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memperediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Adanya otonomi daerah akibat dari di terapkannya system pemerintahan desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan daerahnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sumber pendapatan tersebut antara lain adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Sebagai transfer tak bersyarat maka DAU dan penggunaa ditetapkan sendiri oleh daerah. Tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical pusat daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Kenaikan Dana Alokasi Umum yang terjadi di setiap tahunnya seharusnya dapat meningkatkan retribusi daerah karena retribusi daerah di dapat dari baiknya tingkat kehidupan di dalam masyarakat dengan cara menurut UU No.28 tahun 2009 untuk meningkatkan retribusi daerah perlu mengoptimalkan kebutuhan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklafikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi bertujuan untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi juga bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan.

Nur (2020:6) mengartikan akuntansi sebagai sistem informasi yang dapat mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengambil keputusan. Menurut Sasongko, dkk (2016:2) akuntansi adalah proses atau aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi mengenai keuangan dengan tujuan untuk kepentingan para penggunanya. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

Pada dasarnya akuntansi adalah sistem yang memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak perusahaan yang memiliki kepentingan ataupun kepada para pengguna informasi yang membutuhkan. Pengguna informasi akuntansi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pemakai

internal yang terdiri dari para direktur, manajer, dan karyawan suatu perusahaan sedangkan pemakai eksternal terdiri dari para investor, kreditor, dan pemerintah (Sastroatmodjo dan Purnairawan, 2021:2).

## 2.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pramudiana, 2017).

## 2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## 2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Bagi Hasil
- c. Dana Alokasi Umum
- d. Dana Alokasi Khusus

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

- a. Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah ditahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen didalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber- sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

## 2.6 Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan menurut menurut Irham Fahmi (2012:107), rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.

Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. Menurut Harahap (2008:298), Keunggulan tersebut adalah:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3. Mengetahui posisi keuangan di tengah industri lain.
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi.
5. Menstandarisir size perusahaan.
6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain untuk melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah .

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah  
 Alamat : Pondang, Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara  
 Waktu Penelitian : Mei Sampai September 2021

### 3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terutamanya adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka antara lain Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Minahasa Selatan

### 3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah dari wawancara secara langsung kepada staf bagian akuntansi, staf bagian keuangan, pimpinan wilayah dan pihak lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah dari studi kepustakaan, jurnal ilmiah, buku-buku teks, internet, serta media lainnya.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. observasi dalam penelitian ini dilakukan beberapa kali, observasi awal bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan, serta permasalahan lingkungan, dan observasi kedua bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan di BKAD Minsel Sulawesi Utara.
2. Metode Dokumentasi (Documentation) yaitu, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada.

### 3.6 Metode dan Proses Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh dengan analisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka yaitu yang berkaitan dengan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang kondisi sebenarnya perusahaan tersebut.

1. Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan seberapa likuidnya perusahaan tersebut serta seberapa kemampuan perusahaan agar dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio likuiditas ini penting bagi perusahaan tersebut, karena rasio likuiditas yang buruk dalam jangka panjang akan mempengaruhi.

$$\text{Current ratio} = (\text{Aktiva lancar} : \text{utang lancar}) \times 100\%$$

$$\text{Quick ratio} = [(\text{Aktiva lancar} - \text{persediaan} / \text{utang lancar})] \times 100\%$$

$$\text{Cash ratio} = [(\text{Kas} + \text{setara kas}) : \text{utang lancar}] \times 100\%$$

2. Rasio solvabilitas (*leverage*) rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan tersebut dibayar dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Jika semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan, maka resiko keuangannya semakin tinggi.

$$\text{Debt ratio} = \text{total utang} / \text{Total Aset} \times 100\%$$

$$\text{Debt-to-equity ratio} = \text{total jumlah utang} / \text{ekuitas (modal)} \times 100\%$$

$$\text{Times interest-earned ratio} = \text{laba sebelum pembayaran pajak dan bunga} / \text{beban bunga} \times 100\%.$$

3. Rasio profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Dapat dipastikan bahwa semakin tinggi rasio ini adalah semakin baik karena laba yang diperoleh semakin besar.

$$\text{Gross profit margin} = (\text{gross profit} / \text{total income}) \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Minahasa Selatan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 dan 2020. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, namun komponen dalam LRA yang digunakan hanyalah Pendapatan Daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut digunakan perhitungan rasio keuangan.

Tabel 4.1

#### Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Minahasa Selatan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih
2016	10.936.653.416,00	12.624.434.000,00	(1.687.780.584,00)
2017	12.281.231.406,00	11.555.583.553,00	725.647.853,00
2018	14.407.054.688,00	13.236.918.150,00	1.170.136.538,00
2019	17.345.100.236,00	17.385.618.729,00	(40.518.493,00)
2020	11.652.714.930,00	11.045.488.971,00	607.225.959,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 2016-2020

Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah provinsi mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan tahun 2016,2017,2018 dan 2020 sebesar 17.345.100.236,00 dan anggarannya 17.385.618.729,00 dengan selisih 40.518.493,00.

### 4.2 Perhitungan Rasio Likuiditas

Tingkat likuiditas suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar kemampuan

perusahaan menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Untuk menganalisis tingkat likuiditas pada BPKAD, maka penulis menggunakan laporan keuangan selama 5 periode yaitu dari tahun 2016-2020.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Cepat (*Quick Ratio*) pada BKAD Minsel**

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Persediaan	Rasio Cepat
2016	5.173.157.975	2.833.477.465	368.229.321	169%
2017	6.057.235.469	3.003.770.609	71.661.632	199%
2018	5.473.157.654	2.833.477.465	368.229.321	169 %
2019	4.857.345.469	3.003.770.609	71.661.632	199%
2020	5.057.235.469	3.003.770.609	71.661.632	199%

Sumber : Bkad Minsel, 2021

Rasio cepat pada tahun 2016 BKAD Minsel adalah sebesar 169% yang dapat diartikan bahwa setiap Rp 100,00 kewajiban dijamin dengan 169% asset lancar. Tahun 2017 rasio cepat perusahaan adalah sebesar 199% yang berarti setiap Rp 100,00 kewajiban dijamin dengan 199% asset lancar yang cepat diuangkan. Rasio cepat pada tahun 2018 BKAD Minsel adalah sebesar 169% yang dapat diartikan bahwa setiap Rp 100,00 kewajiban dijamin dengan 169% asset lancar. Rasio cepat pada tahun 2019 dan 2020 BKAD Minsel adalah sebesar 199% yang berarti setiap Rp 100,00 kewajiban dijamin dengan 199% asset lancar yang cepat diuangkan. Rasio Cepat pada tahun 2017, 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, dimana rasio cepat mengalami peningkatan sebesar 30% dibanding tahun 2016 dan 2020. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio cepat pada BKAD minsel tahun 2017, 2019 dan 2020 lebih baik dibanding tahun 2016 dan 2018.

#### 4.3 Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan mengalami likuidasi

**Tabel 4.3**  
**Total Debt To Asset Ratio BKAD Minsel 2016-2020**

Tahun	Total Hutang	Total Aktiva	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
2016	27.857.477.488	33.516.694.382	83.11 %
2017	25.021.684.697	32.607.949.641	76.73 %
2018	24.157.477.433	34.516.654.482	83.11 %
2019	25.857.477.456	32.916.694.383	76.80 %
2020	25.721.674.543	32.607.949.641	76.73 %

Pada tahun 2016 BKAD adalah sebesar 83,11%. Ini berarti 83,11% total asset yang dimiliki oleh perusahaan dibelanjai dengan kewajiban. Kemudian pada tahun 2017 DAR perusahaan adalah sebesar 76,73%. Ini berarti 76,73% total asset yang dimiliki oleh perusahaan dibelanjai dengan kewajiban. *Total Debt to Total Asset Ratio* pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,38% dibanding tahun 2016. dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan dari 83,11% ke

76.73% Dengan demikian *Total Debt to Total Asset Ratio* pada tahun 2020 adalah lebih baik dibanding dengan tahun 2016.

#### 4.4 Pembahasan

Pada Rasio Lancar setiap Rp 100,00 kewajiban lancar dijamin dengan 201% asset lancar. *Rasio lancar* pada tahun 2020 lebih baik dibanding tahun 2016 karena terjadi peningkatan sebesar 19%. Maka *rasio lancar* pada tahun 2020 masih lebih baik dibanding tahun 2016. Rasio cepat pada tahun 2016 BKAD Minsel adalah sebesar 169% yang dapat diartikan bahwa setiap Rp 100,00 kewajiban dijamin dengan 169% asset lancar. Tahun 2020 rasio cepat perusahaan adalah sebesar 199% yang berarti setiap Rp 100,00 kewajiban dijamin dengan 199% asset lancar yang cepat diuangkan. Rasio Cepat pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana rasio cepat mengalami peningkatan sebesar 30%. dibanding tahun 2016. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio cepat pada BKAD Minsel tahun 2020 lebih baik dibanding tahun 2016.

Pada tahun 2016 BKAD Minsel adalah sebesar 83,11%. Ini berarti 83,11% total asset yang dimiliki oleh perusahaan dibelanjai dengan kewajiban. Kemudian pada tahun 2020 DAR perusahaan adalah sebesar 76,73%. Ini berarti 76,73% total asset yang dimiliki oleh perusahaan dibelanjai dengan kewajiban. *Total Debt to Total Asset Ratio* pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6.38% dibanding tahun 2016. Dengan demikian *Total Debt to Total Asset Ratio* pada tahun 2020 adalah lebih baik dibanding dengan tahun 2016. Sedangkan *Debt to Equity Ratio* pada tahun 2016 BKAD Minsel adalah sebesar 492%, yang berarti 492% ekuitas perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Kemudian pada tahun 2020 *Debt to Equity Ratio* BKAD Minsel adalah sebesar 329% yang berarti 329% ekuitas perusahaan juga dibiayai dengan kewajiban. *Debt to Equity Ratio* perusahaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 163% dibanding tahun 2020. Hal ini dikarenakan total kewajiban lebih besar dibanding dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 2016, dimana seharusnya tidak terlalu tinggi, karena semakin tinggi rasio ini maka semakin besar resiko kebangkrutan yang ditanggung oleh perusahaan. *Debt to Equity Ratio* pada tahun 2020 adalah lebih baik dibanding dengan tahun 2016.

Analisis Profitabilitas terdiri dari RETA dan EBITTA nilai rasio RETA pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 0.012, sedangkan nilai rasio EBITTA mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0.1225 yang sebelumnya pada tahun 2016 rasio EBITA sebesar 0.1025

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data BPKAD Minsel maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis rasio antara tahun 2016-2020 didapatkan hasil yang baik. Hal tersebut dideteksi dari peningkatan dari beberapa parameter kinerja keuangan. Diantaranya Rasio Likuiditas dan rasio solvabilitas yang meningkat.
2. Analisis Profitabilitas berdasarkan analisis yang memakai analisis rasio RETA dan EBITTA mengalami peningkatan yaitu dari 2016 sampai 2020 yaitu rasio RETA pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan angka 0,044, yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 0.012 dan sedangkan nilai rasio EBITTA mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0.1225 yang sebelumnya pada tahun 2016 rasio EBITA sebesar 0.1025.

### 5.2 Saran

1. Saran agar peneliti selanjutnya dapat meneliti di tahun berikutnya mengenai Evaluasi Kinerja Keuangan Yang ada Di Pendapatan Asli Daerah BKAD Minsel dengan Mengukur dengan Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas.
2. Sebaiknya Pendapatan Asli Daerah BKAD Minsel oleh tiap - tiap komponen bidang yang akan direncanakan didalam Laporan Realisasi Anggaran harus dilakukan Analisa terlebih dahulu dan mengadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, S. (2008). Laporan Keuangan. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Indrawan dan Yaniawati, R. (2014). Metodologi Penelitian. Bandung: PT. REFIKA ADITAMA.
- Nur, S. W. (2020). Akuntansi Dasar: Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Cendekia Publisher. Makassar.
- Pramudiana, A.(2017). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sastroatmodjo, S. dan Purnairawan, E. (2021). Pengantar Akuntansi. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi* sia. Jakarta: Salemba Empat.